

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Ferdy Posumah

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email : posumahf@yahoo.com*

ABSTRAK

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu daerah berkembang dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi di Sulawesi Utara baik itu dari sector pendidikan, sector kesehatan dan sector pertanian. Tingkat pembangunan infrastuktur yang tinggi juga secara tidak langsung akan meningkatkan investai. Hal ini mendorong pemerintah meningkatkan jumlah infrastruktur di kabupaten minahasa tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur sector pertanian, sector kesehatan dan sector pendidikan terhadap investasi di kabupaten minahasa tenggara tahun 2011 - 2013. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi - instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sector kesehatan dan sector pendidikan tidak berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan pembangunan infrastruktur sector pertanian berpengaruh terhadap investasi.

Kata kunci: *Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Minahasa Tenggara*

I. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan perkembangan sosial dan kegiatan ekonomi wilayah, prasarana (infrastruktur) umum merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi mempunyai prasarana sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, dalam mengsucceskan pembangunan setiap lembaga sosial dan sektor kehidupan ekonomi harus memperhatikan infrastrukturnya. Berdasarkan pengalaman yang ada pembangunan sering terjadi tidak efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit.

Proses pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dipahami sebagai analogi dari proses pertumbuhan ekonomi nasional (McCann, 2001). Perbedaan pokoknya terletak pada kenyataan bahwa pergerakan faktor produksi antar wilayah jauh lebih mudah terjadi dibandingkan dengan pergerakan faktor produksi antar negara. Akibat langsung dari fakta ini adalah peranan perdagangan antar wilayah menjadi penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi wilayah yang sudah tentu dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, para pakar infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selanjutnya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi tercapainya pembangunan berkesinambungan. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah.

Isu pembiayaan infrastruktur oleh pemerintah merupakan perbincangan yang sangat menarik dikalangan para pakar. Diakui oleh para pakar bahwa pemerintah memang menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan infrastruktur, dimana keterbatasan dana menyebabkan tidak memungkinkan pemerintah mengandalkan metode pembiayaan konvensional untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Bahkan untuk infrastruktur dimana kelayakan finansial tidak mungkin dicapai seperti di daerah terpencil dan pedesaan, dana pemerintah masih belum mencukupi mengingat biaya investasi yang cukup besar. (Hermanto Dardak ;<http://www.ekorakyat.org>).

Salah satu kebijakan pengembangan infrastruktur yang saat ini paling disoroti adalah masalah kebijakan investasi, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan : infrastruktur apa yang sebaiknya segera dikembangkan oleh suatu daerah? Apa kriteria investasi yang dijadikan sebagai dasar? Siapa yang melakukan investasi? dan bagaimana pola investasi dilakukan? Kesemua pertanyaan tersebut menjadi penting di era otonomi daerah saat ini.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, ada dua paradigma baru yang dikembangkan berkait dengan kebijakan investasi infrastruktur tersebut. Pertama bahwa kebijakan investasi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Kedua adalah kebijakan investasi ini juga melibatkan secara intens berbagai stakeholder termasuk lembaga Legislatif Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD).

Bagi daerah yang memiliki sumber dana memadai, permasalahan justru timbul pada bagaimana mengalokasikan dana dengan baik dan tepat agar sepenuhnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, bagi daerah dengan sumber dana terbatas, permasalahannya menjadi lebih rumit. Selain harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam kebijakan investasi, juga harus merumuskan kebijakan investasi yang mampu menstimulir atau merangsang pihak ketiga untuk dapat dan mau terlibat dalam kegiatan investasi infrastruktur ini.

Apapun kondisi daerahnya, maka persoalan kebijakan investasi pengembangan infrastruktur saat ini menjadi persoalan yang krusial. Hal ini di samping karena kebutuhan akan pengembangan infrastruktur terasa semakin besar, juga di masa depan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam merumuskan kebijakan investasi bagi perkembangan teknologi, maupun perkembangan politik yang semakin dinamis. Dalam kerangka itulah workshop kebijakan investasi bagi infrastruktur ini diadakan, agar para pengambil keputusan di daerah, baik anggota legislatif maupun eksekutif daerah memiliki kapasitas yang lebih mumpuni, sehingga mampu bersama-sama dalam merumuskan kebijakan investasi pengembangan infrastruktur secara sinergis, strategis dan optimal, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan dimasa mendatang. (Santoso ;<http://www.ijb.ac.id>).

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan kompensasi dalam bentuk kerja sama investasi, subsidi, garansi, dan penghapusan pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005. Kompensasi diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang lolos dalam penyaringan KKPP1 (Komite & Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur) dan Komite Pengelolaan Resiko Departemen Keuangan.

Perpres No 67 Tahun 2005 merupakan pengganti Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1989. Perpres baru ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan paradigma dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur, antara lain berupa penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dengan adanya peraturan baru ini, banyak resiko yang dibebankan kepada pemerintah. Sebagai *feed back*-nya, kompensasi mampu mempercepat penyediaan infrastruktur di Indonesia. Badan usaha yang berpeluang memperoleh kompensasi adalah BUMN, BUMD, koperasi dan swasta, dan dukungan tersebut dalam bentuk *public service obligation* (subsidi).

Berkenaan dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyediaan infrastruktur, maka diharapkan kepada setiap wilayah provinsi, kabupaten/kota

untuk mempersiapkan wilayahnya masing- masing dalam kerangka pembangunan infrastruktur melalui kerjasama investasi yang berkesinambungan.

Seiring dengan program unggulan yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten tersebut, Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga merupakan bagian daripada urat nadi dalam percepatan pembangunan adalah salah satu daerah yang memiliki akses langsung secara geografis menghubungkan ibukota provinsi dan wilayah kabupaten lainnya, sehingga dibutuhkan perhatian yang sifatnya membangun (constructive) dalam hal prasarana dan sarana penunjang seperti infrastruktur jalan, sarana kesehatan, prasarana pada sektor pertanian serta sarana penunjang peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, yang dibarengi oleh perubahan institusional dan modernisasi serta pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income equity), kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi daerah.

Perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang telah diterangkan di atas merupakan dampak kebijakan fiskal pemerintah daerah, terutama dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya dalam pelayanan publik, dengan alokasi belanja modal yang diinvestasikan untuk perintisan pengembangan industri skala menengah.

Perkembangan investasi di minahasa Tenggara tidak mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 yang tetap sama sebesar Rp 639.420.000.000 tapi mengalami peningkatan menjadi Rp 640.923.000.000 di tahun 2013. Pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara hendaknya ditujukan untuk membebaskan warga masyarakat dari berbagai belenggu yang menghambat pencapaian potensi dirinya secara hakiki. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat. Sebab akhirnya keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada hasil penilaian keadaan warga masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah ini sangat ditentukan oleh kinerja perekonomian, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, dan sedikit pada upaya meminimalkan ketimpangan.

Dana yang direalisasikan untuk infrastruktur sector pendidikan di minahasa Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar Rp 6.155.000.000 menjadi Rp 16.394.000.000 di tahun 2012 dan terus meningkat menjadi Rp 24.352.000.000 di tahun 2013. Dana yang direalisasikan untuk infrastruktur sector kesehatan di minahasa Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar Rp 2.114.000.000 menjadi Rp 8.434.000.000 di tahun 2012 dan terus meningkat menjadi Rp 9.321.000.000 di tahun 2013. Dana yang direalisasikan untuk infrastruktur sector pertanian di Minahasa Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar Rp 2.162.000.000 menjadi Rp 3.420.000.000 di tahun 2012 dan terus meningkat menjadi Rp 4.449.000.000 di tahun 2013.

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat bersangkutan. (Sanusi, 2004:8).

Pembangunan ekonomi menurut Kuncoro (2004:51) adalah proses penciptaan lingkungan oleh masyarakat yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan fisik, peraturan dan perilaku.

Teori Infrastruktur

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004).

Menurut Arthur Lewis, (1994:114) Prasarana (*Infrastructure*) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem. Sementara itu, prioritas yang kurang penting (terutama kebutuhan konsumen domestik) sudah tersingkir karena tidak adanya suplai tetapi investasi utama tidak mungkin dibuat tetap.

Teori Investasi

Kindleberger (1996:354) mendefinisikan investasi asing langsung sebagai setiap arus pinjaman, atau pembelian hak pemilikan dalam suatu perusahaan asing yang sebagian besar dimiliki oleh penduduk negara penanam modal. Porsi pemilikan tersebut untuk masing-masing negara berbeda, misalnya di USA pemilikan 10 % atas perusahaan oleh asing dapat dikatakan sebagai investasi asing langsung.

Summers dan Heston (1991) serta Pritchett (1996) menyatakan bahwa investasi akan menghasilkan efektivitas produktivitas infrastruktur yang berbeda di setiap negara. Ini disebabkan perbedaan tingkat efisiensi sektor publik dan nilai investasi dalam pembangunan infrastruktur.,

Penelitian Terdahulu

Hasudungan S. 2007, "Pengaruh PDRB perkapita, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banggai". Dari hasil penelitiannya dengan menggunakan regresi berganda dijelaskan bahwa naik turunnya penerimaan PBB dipengaruhi oleh naik turunnya PDRB perkapita, infrastruktur jalan dan

jumlah keluarga sebesar 0,774. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah perlu melakukan investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, sehingga secara bersama-sama pertumbuhan yang diikuti kenaikan pendapatan perkapita akan meningkatkan penerimaan PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2006) tentang Kebijakan Investasi sebagai bagian pembangunan nasional menyimpulkan bahwa salah satu kekurangan besar dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada minimnya infrastruktur yang mendukung proses tersebut. Infrastruktur tersebut bukan hanya dalam lingkup *overhead* ekonomi tetapi juga *overhead* social. Oleh karena itu sangat sulit mengharapkan daerah bisa menampung dan mengelola dana investasi yang masuk, karena dari segi fasilitas tidak memungkinkan. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan juga menyerap dana yang besar, sehingga logis bila dana yang dimiliki daerah lebih banyak digunakan untuk menyediakan fasilitas tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Agunan P. Samosir dan Tri Wibowo (2004) tentang "Efektifitas Pemberian Insentif Fiskal di Kawasan Timur Indonesia" menyimpulkan bahwa Insentif pajak bukanlah yang terpenting bagi daya tarik investasi. Kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, dan SDM merupakan unsur penting lainnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat berharap terlalu banyak dari insentif jika hambatan investasi lainnya tidak diatasi. Daya tarik investasi mestinya sedapat mungkin disediakan berupa aspek-aspek fundamental sehingga investasi yang masuk lebih berkualitas daripada sekadar memanfaatkan berbagai insentif dan setelah itu pindah ke tempat lain.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud, berupa data rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa Tenggara dan data besarnya investasi yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, serta BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara. Data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Minahasa Tenggara Tahun 2011-2013.

Model analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*) atau *explanatory variable* (Supranto, 2005:36).. Di mana analisis ini untuk mengetahui sebagaimana pengaruh Infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pertanian terhadap investasi yang ada di Minahasa Tenggara.

Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan ($Adj R^2$)

Uji keragaman digunakan untuk melihat sejauh mana besar keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Uji ini digunakan juga untuk mengetahui seberapa kuat variabel yang dimasukkan ke dalam model dapat menerangkan model tersebut. *Adjusted R-Squared* merupakan koefisien determinasi yang sudah disesuaikan terhadap jumlah variabel bebas dalam model. Untuk mengetahui keragaman antar variabel dapat dilakukan uji keragaman yang mengikuti persamaan :

$$AdjR^2 = \frac{1 - (1 - R^2)n - 1}{n - k}$$

Uji-F

Uji-F digunakan untuk menguji kelayakan model dan menguji parameter regresi secara keseluruhan. Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{minimal ada salah satu } \beta_i \neq 0$$

Jika seluruh nilai sebenarnya dari parameter regresi sama dengan nol maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas.

Uji-t

Uji-t digunakan untuk menguji parameter secara parsial. Dengan uji-t akan dilihat apakah setiap variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel dependen (Y).

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Untuk uji-t ini dapat dilihat melalui *p-value* dari masing-masing variabel bebas. Jika *p-value* lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel tak bebas, begitupun sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti terdapat hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Dampak yang ditimbulkan adalah koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai *standard error* setiap parameter menjadi tak terhingga.

Uji Heteroskedastisitas

Suatu model dikatakan baik apabila memenuhi asumsi homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) atau memiliki ragam konstan. Terjadinya heteroskedastisitas dapat menyebabkan tidak tercapainya sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimated*). Untuk melihat gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Gleijser dengan cara memutlakan nilai residual ($|u|$), kemudian membuat regresi ($|u| = b_0 + b_1X_1$). Jika nilai *p-value* lebih besar dari

taraf nyata yang digunakan maka ragam galat konstan (homoskedastisitas) yang berarti model terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Gejala autokorelasi besarkemungkinan terjadi pada observasi yang menggunakan data *time series* karena data yang terdapat pada suatu periode dipengaruhi oleh data yang terjadi pada periode sebelumnya. Akibatnya, varians yang diperoleh menjadi *under estimated*. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Run.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Hasil Pengujian Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Investasi	Pendidikan	Kesehatan	Pertanian
N		11	11	11	11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	18.8522	15.2738	14.1821	13.5910
	Std. Deviation	.36129	.55266	.73872	.45369
Most Extreme Differences	Absolute	.274	.135	.157	.141
	Positive	.177	.117	.135	.093
	Negative	-.274	-.135	-.157	-.141
Test Statistic		.274	.135	.157	.141
Asymp. Sig. (2-tailed)		.321 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel ini maka terlihat bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai uji masing-masing variabel adalah 0.321 investasi swasta, 0.200 pendidikan, 0.200 kesehatan, 0,200 pertanian. Nilai Kolmogorov-Smirnov masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Tabel 1.2 Nilai VIF yang digunakan dalam Penelitian

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendidikan	.903	1.108
Kesehatan	.220	4.544
Pertanian	.222	4.501

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2015

Bila VIF < 10,00 maka tidak terjadi gejala Multikolerasi
 Bila VIF > 10,00 maka terjadi gejala Multikolerasi

Dengan Hasil :

Nilai Tolerance : X1 Infrastruktur Pendidikan = 0.903
 : X2 Infrastruktur Kesehatan = 0.220
 : X3 Infrastruktur Pertanian = 0.222

Nilai VIF : X1 Infrastruktur Pendidikan = 1.108
 : X2 Infrastruktur Kesehatan = 4.544
 : X3 Infrastruktur Pertanian = 4.501

Berdasarkan uji *heterokedastisitas* hasil perbaikan model maka terlihat penyebaran residu adalah tidak teratur dengan plot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas dalam model penelitian, sehingga dengan demikian persamaan regresi yang akan digunakan telah memenuhi asumsi *heterokedastisitas* yakni varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki kesamaan atau tidak membentuk pola tertentu sebagaimana yang terlihat dalam *scatterplot* tersebut diatas.

Tabel 1.3 Hasil Pengujian Autokorelasi Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.920 ^a	.846	.779	.16967	.681

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian,2015

Pada analisis regresi terlihat bahwa nilai DW 0.681 dan nilai DL 0.467, dan DU 1,896 .DL < DW < DU yakni 0.467 DL, 0.681 DW, 1.896 DU. Berada pada antara DL dan DU dan berada pada titik keragu-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah.

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Tabel 1.4 Nilai Koefisien dan Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.953	2.143		4.179	.004
	Pendidikan	-.094	.102	-.144	-.924	.386
	Kesehatan	-.511	.155	-1.046	-3.303	.013
	Pertanian	1.368	.251	1.718	5.453	.001

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian,2015

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Y = 8.953 - (-0.094X_1) - (-0.511X_2) - 1.386X_3$
- Nilai konstanta sebesar 8.953 mengandung arti bahwa jika nilai pendidikan, kesehatan dan pertanian adalah sebesar 1% , maka investasi akan sebesar 8.953 (tetap).
- Nilai koefisien regresi X_1 sebesar -0.094 mengandung arti bahwa jika pendidikan bertambah sebesar 1% maka investasi berkurang sebesar -0.094%.
- Nilai koefisien regresi X_2 sebesar -0.511 mengandung arti bahwa jika kesehatan bertambah 1% maka investasi akan berkurang sebesar -0.511%.
- Nilai koefisien regresi X_3 sebesar 1.368 mengandung arti bahwa jika pertanian bertambah 1% maka investasi akan bertambah sebesar 1.368 % ceteris paribus.

PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN PENDIDIKAN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN INVESTASI

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 11 - (3+1) = 7$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1,894 (untuk uji dua arah)

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $0,924 < t$ tabel sebesar 1,894. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada Pengaruh Linear antara Variabel Independen Pendidikan terhadap Variabel Dependen Investasi.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Pendidikan terhadap Variabel Dependen Investasi diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,924 tidak Signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0,386 > 0,005$.

PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN KESEHATAN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN INVESTASI

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $-3,303 < t$ tabel sebesar 1,894. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada Pengaruh Linear antara Variabel Independen Pendidikan terhadap Variabel Dependen Investasi.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Kesehatan terhadap Variabel Dependen Investasi diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah -3,303 Signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0,013 < 0,005$.

PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN PERTANIAN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN INVESTASI

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 5,453 > t tabel sebesar 1,894. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada Pengaruh Linear antara Variabel Independen Pertanian terhadap Variabel Dependen Investasi.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Pertanian terhadap Variabel Dependen Investasi diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 5,453 Signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0,001 < 0,005.

Tabel 1.5 Uji Korelasi, Kontribusi, dan Pengaruh Simultaan Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 ^a	.846	.779	.16967

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel ini maka interpretasi adalah sebagai berikut :

- Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,920. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara pendidikan, kesehatan dan pertanian sebagai variabel bebas dengan investasi swasta sebagai variabel terikat adalah sangat erat dan bersifat positif.
- Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,846 atau 84,6%. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 84,6% mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variabel Pendidikan, kesehatan dan pertanian secara bersama-sama terhadap investasi swasta adalah sebesar 84,6% sedangkan sisanya 15,4% disumbangkan oleh variabel lain.

Tabel 4.6 Kelayakan Regresi ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.104	3	.368	12.780	.003 ^b
	Residual	.202	7	.029		
	Total	1.305	10			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Menghitung nilai F tabel dengan Ketentuan besar nilai taraf Signifikansi sebesar 0,05 dan Nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numerator / Vektor 1: Jumlah Variabel – 1 atau 3 – 1 = 2, dan dumerator / Vektor 2 : jumlah kasus-jumlah variabel atau 11 – 3 = 8. Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 5,317.

Hasil uji hipotesis adalah :

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar 12.780 > F tabel sebesar 4,747. Dengan demikian H0 ditolak, dan H1 diterima. Artinya ada hubungan linier

antara Variabel Independen Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian dengan Variabel Dependen Investasi. Dengan nilai Sig 0,003 Kesimpulan adalah model regresi di atas sudah layak dan benar.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil regresi, variabel pendidikan berpengaruh negatif dan secara statistik tidak signifikan terhadap investasi. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar -0,924. Hal ini berarti bahwa jika Pendidikan turun sebesar 1% maka investasi di Minahasa Tenggara sebesar -0,924.

Berdasarkan hasil regresi, variabel kesehatan berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan terhadap investasi. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar -3,303. Hal ini berarti bahwa jika Kesehatan turun sebesar 1% maka investasi di Minahasa Tenggara sebesar -3,303.

Berdasarkan hasil regresi, variabel Pertanian berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap investasi. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 5,453. Hal ini berarti bahwa jika Kesehatan turun sebesar 1% maka investasi di Minahasa Tenggara sebesar 5,453. Variabel pendidikan sudah sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa Pengaruh Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi di Minahasa Tenggara.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap investasi.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap investasi.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel infrastruktur pertanian berpengaruh dan signifikan terhadap investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agunan P. Samosir dan Tri Wibowo. 2004. *"Efektifitas Pemberian Insentif Fiskal di Kawasan Timur Indonesia"*.

Aritonang. 2006 Kebijakan Investasi Sebagai bagian Pembangunan Nasional.

Canning D, *A Database of World Infrastructure Stocks 1950 - 1995*. The World Bank, Policy Research Working Paper No. 1929.

Dardak, Hermanto., 2004 "*Percepatan Pembangunan Infrastruktur*", <http://www.ekorakyat.org>.

Fadel, Muhammad.2004. *Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah)*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Hasudungan, 2007, *Pengaruh PDRB perkapita, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banggai*, tesis UNSRAT, Manado.

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang *Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi*.

Kindleberger and Peter H. Lindert, *International Economics*, Six Edition, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois, 1978.

Lewis W. Arthur, 1994, *Perencanaan Pembangunan, Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi*, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Santoso, Id wan., Dr. Ir., 2005. "*Workshop Kebijakan Investasi Infrastruktur Bagi Local Government*", Jurnal Ekonomi Rakyat, 2005

Samosir, P. Agunan dan Wibowo Tri, 2004. *Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Fiskal (Studi Kasus Kapet Pare-Pare)*, Artikel Kajian Ekonomi dan Keuangan vol.8 no. 1

Summers dan Heston. 1996. *Commercial Poultry Nutrition*. 3rd Edition. University Brooks. Canada

Strum, J.E, Kuper G.H and De Haan. J., *Modelling Government Investment and Economic Growth on A Macro Level: A Review*. CCSO Series No. 29.